



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 303);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan perumusan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta menciptakan kesesuaian dan sinergi antara Peta Rencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### BAB II PETA RENCANA SPBE

#### Pasal 3

Peta Rencana SPBE memuat arah kebijakan, strategi pengembangan layanan SPBE dan peta jalan SPBE dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai 2022 sampai dengan 2026 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Peta Rencana SPBE meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. layanan SPBE;
- d. infrastruktur SPBE;
- e. aplikasi SPBE;
- f. keamanan SPBE; dan
- g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## Pasal 5

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II VISI MISI DAN SASARAN SPBE;
  - c. BAB III KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN SUKOHARJO;
  - d. BAB IV TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN SUKOHARJO;
  - e. BAB V ANALISIS KESENJANGAN;
  - f. BAB VI PETA RENCANA SPBE KABUPATEN SUKOHARJO;
  - g. BAB VII DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI; dan
  - h. BAB VIII PENUTUP.
- (2) Penjabaran lebih lanjut sistematika Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 Juli 2022  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19790801 200501 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan pemerintah daerah sudah merupakan keniscayaan. Disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. *E-Government* adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

Semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang didorong oleh membaiknya industri di Indonesia, yang memberikan layanan diberbagai sektor kehidupan. Telah terbentuk sebuah standar layanan yang terus membaik akibat model transaksi di bidang ekonomi, seperti hubungan pedagang dan pembeli dalam suatu *digital marketplace*. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi, bahkan jika terbukti terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui social media atau ke ranah hukum.

Jika disimpulkan terdapat tiga latar belakang yang menyebabkan pemerintah harus berbenah dan melakukan transformasi di sektor layanan publik menjadi digital untuk lebih baik, hal tersebut adalah :

1. Globalisasi yang menuntut pemerintah Indonesia selaras dengan perkembangan dunia saat ini

2. Perkembangan Teknologi Informasi yang membuat peran dan fungsi pemerintah menjadi berubah
3. Tuntutan masyarakat yang kualitas hidupnya telah meningkat, sehingga juga menuntut peningkatan kinerja pemerintah.

Pada tahun 2018, telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Perangkat Daerah hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan proyek akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan SPBE sehingga solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, memberikan solusi dalam pengintegrasian sistem sehingga duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
19. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE;
20. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elketronik.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

### 1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

- a. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE Framework);

- b. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE Roadmap);
- c. Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBE Implementation plan);

### 1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sukoharjo yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Sukoharjo;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur TIK Kabupaten Sukoharjo;
4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE; dan
5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

### 1.3. Ruang Lingkup

#### 1.2.1. Bab 2: VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan Visi, misi, dan sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

#### 1.2.2. Bab 3: KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN SUKOHARJO

Bab ini menggambarkan kondisi aktual penerapan SPBE dan kondisi aktual tata kelola TIK, serta visi misi dan sasaran strategis RPJMD tahun 2021 - 2026 Kabupaten Sukoharjo

#### 1.2.3. Bab 4: TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN SUKOHARJO

Bab ini memberikan penjelasan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 – 2026, serta target kualitatif penerapan SPBE Kabupaten Sukoharjo.

#### 1.2.4. Bab 5: ANALISIS KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisis kesenjangan dari setiap domain dan aspek SPBE berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo

#### 1.2.5. Bab 6: PETA RENCANA SPBE KABUPATEN SUKOHARJO

Bab ini berisi peta rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo selama 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

#### 1.2.6. Bab 7: DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Bab ini memberikan detail tahapan Implementasi SPBE yang terdiri dari inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

#### 1.2.7. Bab 8: PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan perencanaan pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun diselaraskan dengan rencana strategis SPBE yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## BAB II

### VISI MISI DAN SASARAN SPBE

#### 2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo

Salah satu evaluasi penerapan *e-Government* di pemerintahan daerah adalah belum terwujudnya sistem yang saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era *e-Government* menuju *i-Government (integrated Government)*. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

##### 2.1.1. Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Sukoharjo selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu:

*“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”*

##### 2.1.2. Misi SPBE

Misi SPBE merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi SPBE. Misi SPBE Kabupaten Sukoharjo dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;

3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### 2.1.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

#### 2.1.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

### 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Sukoharjo

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

#### 2.2.1. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Sukoharjo.
  - a. Masing-masing OPD di Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka

mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Sukoharjo adalah:

- 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
- 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
- 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo.

2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu

a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:

- 1) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
- 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
- 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

### 2.2.2. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:
  - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
  - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
    - 1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
    - 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
  - a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
  - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
    - 1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
    - 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

### 2.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo.
  - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

- b. Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:
- mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
  - terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo;
  - terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
  - menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
- d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
- 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
  - 2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
- b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
  - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
  - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
  - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
    - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
    - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
    - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

#### 2.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo:
  - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
  - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo adalah:
    - 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
    - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

## 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

- a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
  - 1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
  - 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

### 2.3. Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, dan seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan

3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

*Tabel 1. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2018*

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Pada tahun 2021, bobot penilaian Indeks SPBE mengalami perubahan. Ditambahkannya domain Manajemen SPBE, mengubah bobot penilaian Indeks SPBE seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

*Tabel 2. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2021*

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	10	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	4	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	11	16,5%

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
Aspek 6 – Audit TIK	3	4,5%
Domain 4 – Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	18%

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

*Tabel 3. Kategori Nilai Indeks SPBE*

NO	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di tabel 4 berikut.

*Tabel 4. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Tata Kelola dan Kebijakan*

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi
	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen

Tingkat (Level)	Karakteristik
	yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi
	Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral
3 – Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
4 – Terintegrasi dan Terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif
	Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola
5 – Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan

Karakteristik penilaian Indeks SPBE untuk domain Layanan SPBE, dapat dilihat di tabel 5 berikut.

*Tabel 5. Karakteristik Penilaian Indeks SPBE untuk Domain Layanan SPBE*

Tingkat (Level)	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2 – Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3 – Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4 – Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5 – Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

BAB III  
KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN SUKOHARJO

3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2021

Kementerian PANRB pada tahun 2021 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo yang meliputi 4 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE, dengan nilai indeks SPBE sebesar 2,93. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 ditunjukkan oleh tabel 6.

*Tabel 6. Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021*

Domain	Aspek	Indeks
Kebijakan		2,80
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,80
Tata Kelola		2,60
	Perencanaan Strategis SPNE	1,75
	TIK	3,0
	Penyelenggara SPBE	3,50
Manajemen		1,36
	Penerapan Manajemen SPBE	1,50
	Penyelenggara SPBE	3,50
Layanan		3,72
	Layanan Administrasi	3,10
	Layanan Publik	4,67
INDEKS SPBE		2,93

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, penerapan SPBE Kabupaten Sukoharjo untuk Domain Kebijakan dalam kategori Baik. Penerapan SPBE Kabupaten Sukoharjo di dalam Aspek Kebijakan Tata Kelola dan Layanan memiliki level Terdefinisi, yang berarti Kebijakan internal Tata Kelola dan Layanan telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Sukoharjo untuk domain Tata Kelola, masuk dalam kategori Baik. Aspek Tata Kelola Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan TIK dalam level Terdefinisi, yang berarti proses Tata Kelola Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan TIK dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi tersebut.

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Sukoharjo untuk Domain Layanan, masuk dalam Kategori Baik. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam Transaksi, yang berarti layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang terbentuk dari satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

### 3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dipetakan dalam 20 program strategis seperti yang ditunjukkan tabel 7.

*Tabel 7. Kondisi Implementasi SPBE*

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Membuat dan menetapkan Kebijakan SPBE (Perbup/Perwali/SK/SE)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang SPBE</li> <li>2. Perbup nomor 76 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Sukoharjo</li> <li>3. Perbup Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesias Tingkat Daerah</li> <li>4. Perbup Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik dalam SPBE</li> <li>5. Keputusan Bupati nomor 482/11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE Kabupaten Sukoharjo</li> <li>6. Keputusan Bupati nomor : 130/272 Tahun 2022 tentang Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Sukoharjo</li> <li>7. Perbup nomor 50 tahun 2015 tentang RIP e-gov</li> </ol>	
2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pusat Data</li> <li>2. SOP Helpdesk</li> <li>3. SOP Jaringan</li> </ol>	
3	Membuat Peta Rencana SPBE	Belum ada	
4	Membuat Arsitektur SPBE	Belum ada	

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
5	Membentuk Tim Koordinasi ( Pengawas dan Pelaksana) SPBE dengan Tupoksi nya	Keputusan Bupati nomor 060/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE Kabupaten Sukoharjo	
6	Melakukan Evaluasi Berkala SPBE (update indeks SPBE )	1. Keputusan Bupati nomor : 800/133 Tahun 2021 tentang Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Sukoharjo 2. Evaluasi Internal telah dilakukan pada bulan Juni Tahun 2021 dan saat ini menunggu jadwal verifikasi oleh Tim Asesor Eksternal	
7	Melakukan optimalisasi Pusat Data /Server Room /DRC	Pusat Data berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika, <i>co location</i> di Telkom Sygma Surabaya dan di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jateng	
8	Membangun Jaringan Intranet /Metro/VPN / Backbone FO	Jaringan intranet telah terhubung ke seluruh OPD, desa dan kelurahan. Dengan rincian : FO 21 OPD; VPN 12 Puskesmas, 167 desa dan kelurahan; Metro 12 kecamatan & 7 OPD	
9	Membangun Sistem Penghubung / Integrator	<a href="http://commandcenter.sukoharjo.kab.go.id">http://commandcenter.sukoharjo.kab.go.id</a>	
10	Integrasi Layanan Elektronik (Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	Integrasi Layanan elektronik : - Perencanaan, penganggaran, penatalaksana keuangan telah terintegrasi - Layanan kepegawaian terintegrasi dengan layanan kinerja pegawai	
11	Membangun Portal Data	<a href="http://data.sukoharjokab.go.id/">http://data.sukoharjokab.go.id/</a>	
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI) / SNI 27001	Melakukan kerjasama dengan BSSN untuk uji pentest atas aplikasi di Pemkab Sukoharjo	

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
13	Teknologi Kecerdasan Buatan / Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/Command Center	Belum ada	
14	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Melalui peningkatan SD TIK secara terencana dan rutin setiap tahun	
15	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE ( Antar OPD /Antar Kabupaten )	1. Keputusan Bupati nomor 060/14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE Kabupaten Sukoharjo 2. Keputusan Bupati nomor 480/16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan dan Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Sukoharjo	
16	Membentuk SDM TIK	Melalui peningkatan SD TIK secara terencana dan rutin setiap tahun	
17	Membangun Portal Pelayanan Publik	<a href="https://sukoharjokab.go.id/">https://sukoharjokab.go.id/</a>	
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	<a href="https://sukoharjokab.go.id/">https://sukoharjokab.go.id/</a>	
19	Melakukan survey pengguna berkala ( tingkat kepuasan dan koreksi )	Secara rutin dilakukan survey Indek Kepuasan Masyarakat	
20	Membuat Call Center Layanan	Belum ada	

### 3.2.1. Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

*Tabel 8. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo*

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Pangan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Dinas Perhubungan
19	Dinas Pertanian dan Perikanan
20	Dinas Kesehatan
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Dinas Sosial
23	RSUD
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
25	Badan Keuangan Daerah
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	SATPOL PP
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29	Kecamatan Sukoharjo
30	Kecamatan Bendosari
31	Kecamatan Nguter
32	Kecamatan Tawang Sari

No	Organisasi Perangkat Daerah
33	Kecamatan Weru
34	Kecamatan Bulu
35	Kecamatan Gatak
36	Kecamatan Baki
37	Kecamatan Kartasura
38	Kecamatan Grogol
39	Kecamatan Polokarto
40	Kecamatan Mojolaban

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Sukoharjo digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
5. Pelaksanaan fungsi administrasi di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Sistem Informasi, membawahkan:
    - 1) Seksi e-Government;
    - 2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
    - 3) Seksi Pelayanan Informasi Publik;
  - b. Bidang Teknologi Informasi, membawahkan:
    - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
    - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi;
    - 3) Seksi Pengembangan Sistem dan Aplikasi
  - c. Bidang Persandian dan Statistik:
    - 1) Seksi Sandi dan Keamanan Informasi;
    - 2) Seksi Telekomunikasi;
    - 3) Seksi Database dan Statistik; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut daftar SDM Dinas Kominfo beserta kompetensinya, ditunjukkan tabel 9.

*Tabel 9. Daftar SDM di Dinas Kominfo dan Kompetensinya*

NO	NAMA	JABATAN	Pendidikan	Kompetensi
1	SUYAMTO, ST, M. Kom	KEPALA DINAS	S2 Magister Komputer	
2	SUNARNO, SE. M. Eng	KABID TEKNOLOGI INFORMASI	S2 Teknologi Informasi	GCIO
3	ADE KRISTIAWAN, ST. M. Eng	KABID SISTEM INFORMASI	S2 Teknologi Informasi	GCIO
4	SUHARTO, S.Sos	SEKRETARIS	S1 Sosial	GCIO
5	HARYANTI, S. Kom, M. Eng	KASI PENGEMBAN GAN SISTEM DAN APLIKASI	S2 Teknologi Informasi	GCIO
6	DANANG INDRA SUMARDI, S. Kom	KASI INFRASTUKT UR TEKNOLOGI INFORMASI	S1 Komputer	MTCNA, CCNA1, CCNA2
7	META DEWI RAHMAYANI WARA, S.AP, M.Si	KASI PENGELOLA AN SUMBER DAYA TI	S2 Administra si Publik	GCIO

NO	NAMA	JABATAN	Pendidikan	Kompetensi
8	NOVITA RINI, A.Md	PENGELOLA TI	DIII Manajemen Informatika	
9	AULIA RATNA KUSUMA, A.Md	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	DIII Komputer dan Sistem Informasi	
10	MUHAMMAD AJI DARUSSALAM, A.Md	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	DIII Teknik Informatika	
11	R ALVIAN PUTRA MAHARDIKA, S.Kom	Tim Teknis	S1 Sistem Informasi	Web Developer, Android Native, Fundamenta l Android, Sistem Penghubung Layanan berbasis Web API, Backend Web API Programmin g, Front end Web Development , Mobile Fron End with PWA
12	Alfian Suprandanu, S.Kom	Tim Teknis	S1 Teknik Informatika	Cyber Security, Junior Programmin g, Mobile Developer Beginer
13	Bossarito, S.Kom	Tim Teknis	S1 Teknik Informatika	Microsoft Office Desktop Aplication
14	Regyta Dhea Effendi, A.Md	Tim Teknis	D3 Sistem Informasi	
15	Puguh Iman Setiawan H, A.Md	Tim Teknis	D3 Teknik Komputer	Data Center Specialist, MTCNA,

NO	NAMA	JABATAN	Pendidikan	Kompetensi
				Pengelolaan Pusat Data, Pengelolaan layanan operasional pusat data
16	Cesar Tito Adhi Irawan, A.Md	Tim Teknis	D3 Teknik Informatika	Fiber Optic Maintenance , MTCNA
17	Novi Eka Yanti	Tim Teknis	D3	Digital Marketing Pemda

### 3.2.2. Kebijakan

Beberapa kebijakan berupa peraturan yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, seperti ditunjukkan tabel 10.

*Tabel 10. Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK*

NO	PERANGKAT DAERAH	Nomor dan Perihal	Tanggal dan Tahun Penerbitan SK
1	Dinas Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo	21 Mei 2019
		Keputusan Bupati Nomor: 503/433/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Aplikasi Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017	26 April 2017

NO	PERANGKAT DAERAH	Nomor dan Perihal	Tanggal dan Tahun Penerbitan SK
2	Bappelbangda	Tim Teknik Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019	19 Februari 2018
3	Badan Keuangan Daerah	<p>SK Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, No:900/1/I/2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah, pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah, Bendahara penerimaan pembantu, admin simda, admin simda pembantu dan admin finger print dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2021.</p> <p>SOP Pelayanan Pajak Daerah</p> <p>SOP Tata cara pendaftaran wajib pajak baru untuk pajak hotel, retaurant, Hiburan dan parkir</p> <p>SOP Tata Cara Pendaftaran Pendataan dan Penilaian PBB-P2 (Pendataan Pasif)</p> <p>SOP Tata Cara Pendaftaran Pendataan Dan Penilaian PBB-P2 (Pendataan Aktif)</p> <p>SOP Prosedur Penerbitan Massal Dan Penyampaian SPPT PBBP2</p> <p>SOP Tata Cara Pendataan Wajib Pajak Daerah</p>	4 januari 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	Nomor dan Perihal	Tanggal dan Tahun Penerbitan SK
		SOP Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah	
		SOP Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah	11-Nov-19
4	Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja	SK Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Nomor : 027/707/2017, pembentukan tim teknis, pengelola sistem jaringan	
		SK Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Nomor : 027/1555/2019, penunjukan pejabat penerima hasil pekerjaan untuk kegiatan penyusunan informasi bursa kerja kabupaten Sukoharjo	
5	BKPP	SK Bupati No 800/127 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	05 Januari 2018
		SK Bupati No 800/326 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	02 Mei 2018
		SK Bupati No 800/475 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	03-Sep-18

NO	PERANGKAT DAERAH	Nomor dan Perihal	Tanggal dan Tahun Penerbitan SK
		SK Bupati No 800/91 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	02 Januari 2019
		SK Bupati No 800/276 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	01 Maret 2019
		SK Bupati No 800/70 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	07 Januari 2020
		SK Bupati No 800/89 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi Fingerprint Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	02 Januari 2019
		SK Bupati No 800/491 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati No 800/89 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi Fingerprint Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	02-Sep-19
		SK Bupati No 800/60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati No 800/89 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi implementasi	07 Januari 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	Nomor dan Perihal	Tanggal dan Tahun Penerbitan SK
		Aplikasi Fingerprint Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	
		SK Bupati No 800/88 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Maintenance Aplikasi Fingerprint Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	02 Januari 2019
		SK Bupati No 800/275 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Maintenance Aplikasi Fingerprint Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	01 Maret 2019
		SK Sekretaris Daerah No 800/053/2021 Penunjukan Admin Aplikasi Mesin Fingerprint Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	06 Januari 2021
6	DPUPR	SK Bupati No 800/88 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Maintenance Aplikasi Fingerprint Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo	02 Januari 2019
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo Nomor: 045/15.b/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Database Koleksi Perpustakaan Berbasis Teknologi, Informasi dan	6 Januari 2015

NO	PERANGKAT DAERAH	Nomor dan Perihal	Tanggal dan Tahun Penerbitan SK
		<p>Komunikasi Di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015</p> <p>Keputusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 045/1356 b/2017 tentang Migrasi Database Perpustakaan dari SliMS ke Inlislite V.3 di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p>	<p>18 Desember 2017</p>
		<p>Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017</p> <p>Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo Nomor:470/175/2018 dan nomor 041/76/2018 tentang pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan dalam Program Automasi Perpustakaan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo</p> <p>Perjanjian Kerjasama Aplikasi Perpustakaan Digital antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Sukoharjo dengan PT.Enam Kubuku Indonesia</p>	<p>22 Januari 2018</p> <p>24-Sep-18</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	Nomor dan Perihal	Tanggal dan Tahun Penerbitan SK
8	RSUD	Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/16/1/2017 tentang Pembentukan Instalasi Pengolahan Data Elektronik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	14 April 2017
		Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/16.4/2017 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian PDE dan SIMRS	14 April 2017
		Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/16.3/2017 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian PDE dan SIMRS	14 April 2017
		Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo Nomor 445/42/2020 tentang Pengangkatan Kepala Instansi PDE-SIMRS RSUD Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	26 November 2020
		Penambahan dan Perubahan Jaringan Komputer	01 Oktober 2019
		Penambahan dan Perubahan Jaringan Komputer	01 Oktober 2019
		Pencatatan Penggunaan Catridge Printer Laser	01 Oktober 2019
		Penggantian Toner Catridge Printer Dotmatrix	01 Oktober 2019
		Penggantian Pita Printer Dotmatrix	01 Oktober 2019
		Penanganan Kualitas Hasil Cetak Yang Jelek Pada Printer Laserjet	01 Oktober 2019
		Penanganan Kemaetan Kertas Pada Printer Laserjet	01 Oktober 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	Nomor dan Perihal	Tanggal dan Tahun Penerbitan SK
		Pengajuan Kebutuhan Internet	01 Oktober 2019
		Penyambungan Printer Dotmatrix Ke Komputer	01 Oktober 2019
		Prosedur Monitoring Server Simrs Pada Power Failure	01 Oktober 2019
		Pemantauan Suhu dan Kelembaban Ruang Server	01 Oktober 2019
		Penyesuaian Database SIMRS	01 Oktober 2019
		Prosedur Perawatan Server SIMRS	01 Oktober 2019
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE	30 November 2020
		SK Bupati Nomor 482/11 Tahun 2021 tentang Tim TI Desa	4 Januari 2021
		SK Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Tim pengelola sukoharjokab.go.id	4 Januari 2021
		SK Bupati Nomor 060/14 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi dan Pelaksana SPBE	4 Januari 2021
		SK Bupati Nomor 480/16 Tahun 2021 tentang Tim Smart City	4 Januari 2021
		SK Bupati Nomor 480/14 Tahun 2021 tentang Tim Integrasi Sistem Informasi	4 Januari 2021
10	Bagian Administrasi Pembangunan	SK Bupati No. 188/207 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020	27 Januari 2020
		SK Bupati No. 050/208 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan	27 Januari 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	Nomor dan Perihal	Tanggal dan Tahun Penerbitan SK
		Pelaporan Bidang Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020	
		SK Bupati No. 900/209 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020	27 Januari 2020
		SK Bupati Nomor 050/210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020	27 Januari 2020
		SK Bupati Nomor 900/212 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Sukoharjo	27 Januari 2020
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tatacara Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Online	12 Maret 2019

Kebijakan tersebut memberikan pedoman dan aturan mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pedoman penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

### 3.2.3. Tata Kelola TIK

Tata Kelola TIK di Kabupaten Sukoharjo dapat digambarkan dalam 3 perspektif , yaitu:

1. Terdefinisinya dan terlaksananya proses TIK (Perencanaan, Pengembangan, Operasional dan Audit TIK);
2. Adanya pelaksana TIK dengan Tupoksi nya (Dinas Kominfo); dan
3. Adanya pengawas TIK dengan Tupoksi nya (Tim Perumus Kebijakan TIK).

*Tabel 11. Tata Kelola TIK di Kabupaten Sukoharjo*

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Perencanaan ( Adanya Masterplan TIK )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Smart City 2020-2024</li> <li>2. Rencana Induk e-government 2015-2019</li> </ol>	
2	Pengembangan		
	a) Pengembangan Infrastruktur Data Center	Pusat Data di Dinas Kominfo sudah terhubung ke Pusat Data Provinsi dan dalam proses terhubung ke Pusat Data Kemkominfo	
	b) Pengembangan Jaringan OPD	Semua OPD (40), semua desa (150) dan kelurahan (17) telah terhubung ke dalam jaringan intranet yang berpusat di Dinas Kominfo	
	c) Pengembangan Aplikasi	Aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020 yaitu 47 aplikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan dan pelayanan public	

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
	d) Proses Penganggaran tahunan	Sebagai unit pengelola TIK, Dinas Kominfo terlibat sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang terlibat mulai dari proses perencanaan	
	e) Pengembangan SDM TIK	Secara tupoksi berada di bawah Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK dan dalam sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terdapat anggaran pengembangan SDM TIK dan terdapat perancaan SDM TIK
3	Operasional		
	a) Berfungsinya Operator OPD		
	b) Adanya Pusat Service Desk ( <i>Single point of contact</i> )		
	c) Adanya Daftar Layanan TIK		
	d) Adanya SLA Layanan TIK		
4	Melaksanakan Audit TIK secara regular	Audit yang pernah dilakukan adalah Audit BPK atas kinerja SPBE sd semester 1 Tahun 2020	
5	Tupoksi Dinas Kominfo yang telah dan yang belum dilakukan secara optimal sebagai Dinas Kominfo	Tupoksi Dinas Kominfo telah dilakukan	
6	Tupoksi Dewan Pengarah TIK/SPBE ( apakah sudah ada atau belum )	1. Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE 2. Dewan dan Tim Pelaksana Smart City	

### 3.2.4. Infrastruktur Jaringan

Semua OPD di Kabupaten Sukoharjo sudah terhubung jaringan intranet. Semua Desa (150 desa dan 17 kelurahan) juga sudah terhubung jaringan intranet. Sebanyak 36 Perangkat Daerah menggunakan akses internet yang berasal dari Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika. Satu Perangkat Daerah menggunakan akses internet langganan sendiri yaitu RSUD dengan langganan dari PT. Telkom Indonesia, jenis Layanan Gold : 5 Mbps dan Layanan Indihome : 100 Mbps serta dari PT. Selaras Citra Terabit 15 Mbps. Ada sebanyak 10 Perangkat Daerah yang akses internetnya menggunakan layanan Dinas Komunikasi dan Informatika juga menambah langganan layanan dari pihak lain yaitu:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu :  
Indihome 10 Mbps
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Telkomsel Speedy,  
bandwith 10 Mbps
- c. Dinas Sosial : Indihome, bandwith 50 Mbps
- d. DPUPR : Indihome 50 Mbps (akses telepon)
- e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan : Indihome besaran  
bandwith 20 Mbps
- f. Dinas Pertanian dan Perikanan : Indihome besaran bandwith 20  
Mbps
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Hipernet, bandwith 15  
Mbps
- h. Kecamatan Sukoharjo (untuk kelurahan) : Speedy, indiehome,  
Telkom Solution besaran bandwith 60 Mbps
- i. Dinas Kesehatan : Indihome 50 Mbps
- j. Sekretariat DPRD : Telkom (indihome) bandwith 100 mbps

Tabel 12. Data Akses Internet Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo

NO	PERANGKAT DAERAH	AKSES INTERNET DI PERANGKAT DAERAH			
		Jaringan dari DISKOMINFO	Keterangan	Langganan Sendiri	Keterangan
1	Dinas Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu	1		1	Indihome 10 Mbps
2	Dinas Perdagangan Koperasi & UMKM	1			
3	Bappelbangda	1			
4	Badan Keuangan Daerah	1	-	-	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1		1	Telkomsel Speedy, bandwidth 10 Mbps
6	Dinas Sosial	1	Intranet	1	Indihome, bandwidth 50 Mbps
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1			
8	Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja	1			
9	Inspektorat	1			
10	BKPP	1		-	-
11	DPUPR	1	Intranet	1	Indihome 50 Mbps (akses telepon)
12	DPKP	1			
13	Dinas Lingkungan Hidup	1			

NO	PERANGKAT DAERAH	AKSES INTERNET DI PERANGKAT DAERAH			
		Jaringan dari DISKOMINFO	Keterangan	Langganan Sendiri	Keterangan
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1		1	Indihome besaran bandwidth 20 Mbps
15	Dinas Pertanian dan Perikanan	1		1	Indihome besaran bandwidth 20 Mbps
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1		1	Hipernet, bandwidth 15 Mbps
17	Dinas Pangan	1			
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1			
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1			
20	Kesbangpol	1			
21	Satpol PP	1			
22	Kecamatan Sukoharjo	1		1	Speedy, indiehome, Telkom Solution besaran bandwidth 60 Mbps
23	Dinas Kesehatan	1		1	Indihome 50 Mbps

NO	PERANGKAT DAERAH	AKSES INTERNET DI PERANGKAT DAERAH			
		Jaringan dari DISKOMINFO	Keterangan	Langganan Sendiri	Keterangan
24	RSUD			1	PT. Telkom Indonesia -Layanan Gold : 5 Mbps -Layanan Indihome : 100 Mbps PT. Selaras Citra Terabit 15 Mbps
25	DPPKBP3A	1			
26	Dinas Perhubungan	1			
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	1			
28	Sekretariat DPRD	1		1	Telkom (indihome) bandwidth 100 mbps
29	Bagian Pemerintahan	1			
30	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1			
31	Bagian Hukum	1			
32	Bagian Perekonomian dan SDA	1			
33	Bagian Administrasi Pembangunan	1			
34	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1			
35	Bagian Organisasi	1			

NO	PERANGKAT DAERAH	AKSES INTERNET DI PERANGKAT DAERAH			
		Jaringan dari DISKOMINFO	Keterangan	Langganan Sendiri	Keterangan
36	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan	1			
37	Bagian Umum	1			
	JUMLAH	36		11	

### 3.2.5. Aplikasi dan Website

Di setiap OPD mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap OPD dan aplikasi internal administrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo seperti ditunjukkan tabel 13.

*Tabel 13. Daftar Aplikasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo*

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH APLIKASI	NAMA APLIKASI	MANFAAT APLIKASI
1	Dinas Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu	1	SPION	Untuk melayani permohonan perizinan dan nonperizinan
2	Dinas Perdagangan Koperasi & UMKM	2	E Koperasi	Sebagai Data Basp Koperasi dan Pelaporan Elektronik
			E retribusi	Menerapkan sistem Layanan elektronik Khususnya system Pelayanan pasar Retribusi pelayanan Persampahan/ kebersihan dan Retribusi pemakaian Kekayaan daerah
3	Bappelbangda	2	Sistem Informasi Geo Spasial	Informasi geografis tentang perencanaan pembangunan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH APLIKASI	NAMA APLIKASI	MANFAAT APLIKASI
			Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Untuk mengukur Penilaian Kinerja Instansi Pemerintahan
4	Badan Keuangan Daerah	3	SIMPBB	Untuk PBB
			SIMPDRD	Untuk pajak Selain PBB (pajak restoran, hotel, hiburan, dll)
			Cek 346	Pembatasan Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Sistem Informasi Kebencanaan	Informasi Daerah Rawan Bencana dan Pelaporan Peristiwa Kebencanaan
6	Dinas Sosial			
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
8	Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja			
9	Inspektorat	1	Seruling e-Mas (WBS)	untuk pelaporan disiplin pegawai
10	BKPP	5	SI KGB	Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala
			SIMPEG	Pengelolaan Data Pegawai
			ePersonal	Pengelolaan Data Pegawai Mandiri
			ePresensi	Pengelolaan Presensi Pegawai dan TPP
			eKinerja	Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai
11	DPUPR			

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH APLIKASI	NAMA APLIKASI	MANFAAT APLIKASI
12	DPKP	1	Sistem Informasi Manajemen Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	Data Base PSU Perumahan kabupaten Sukoharjo
13	Dinas Lingkungan Hidup			
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4	Inislite v.3.1	Untuk mengelola koleksi, anggota perpustakaan, penuluruhan koleksi/katalog online, proses pinjam/kembali/perpanjang koleksi, bebas perpustakaan, absensi, pelaporan secara otomasi.
			Eperpus Sukoharjo: Digital Library	Untuk menyediakan, mengolah dan melayani koleksi dalam format digital yang diakses secara online Melalui Smartphone android & PC Windows
			Arsip IMB	Sarana temu balik arsip IMB
			Arsip Inaktif	Sarana temu balik arsip inaktif
15	Dinas Pertanian dan Perikanan	1	SITAMA	Pengumpulan data dinas dan pelaporan dari masyarakat.
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	PPDB online	Penerimaan Peserta Didik online
17	Dinas Pangan			
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH APLIKASI	NAMA APLIKASI	MANFAAT APLIKASI
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga			
20	Kesbangpol			
21	Satpol PP			
22	Kecamatan Sukoharjo			
23	Dinas Kesehatan	7	SIMPUS Rawat Jalan	untuk manajemen kunjungan pasien rawat jalan di 12 Puskesmas Induk.
			SIMPUSTU	untuk manajemen kunjungan pasien rawat jalan di puskesmas pembantu.
			SIMPUS Gizi KIA	untuk Manajemen Data KIA di 12 Puskesmas.
			SIMKES Terpadu	Untuk mememanajemen data pelayanan di 12 puskesmas
			Website Profil DKK	
			SIMBAD	Untuk Manajemen Obat di Dinas Kesehatan ( Gudang Farmasi )
			Laboratorium Informasi Sistem (LIS)	ntuk pengelolaan Pendaftaran, Hasil, Stok BHP, Rekap Kunjungan di Laboratorium Kesehatan Kab. Sukoharjo
24	RSUD	5	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Krakatau Hospital System	Sistem informasi manajemen rumah sakit

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH APLIKASI	NAMA APLIKASI	MANFAAT APLIKASI
			Website rumah sakit	Website informasi rumah sakit Booking pendaftaran online pasien 3. Informasi ketersediaan tempat tidur pasien
			Sistem Administrasi rawat inap	Administrasi rawat inap dan pasien elektif
			Sistem manajemen dokumen akreditasi	Manajemen dokumen akreditasi
			KARIR (Sistem rekrutmen pegawai non PNS)	Sistem informasi rekrutmen pegawai non PNS
25	DPPKBP3A			
26	Dinas Perhubungan	3	SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen pengujian kendaraan bermotor)	Pendaftaran uji, uji dan cetak hasil uji
			SIMPLAN (Sistem informasi perlengkapan jalan)	Mendata perlengkapan jalan, rambu, PJU marka jalan dll
			SIM ANDALALIN	Pendaftaran pengajuan andalalin
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	SKUTER (Surat Keterangan Desa Terpadu)	Aplikasi untuk membuat surat keterangan di desa/kelurahan secara online
			PIDEKSO (Pangkalan Informasi Desa)	Portal pusat informasi data desa

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH APLIKASI	NAMA APLIKASI	MANFAAT APLIKASI
			COMMAND CENTER	Aplikasi pusat data semua Perangkat daerah
			Aplikasi Android Sukoharjo	Berbagai aplikasi berbasis mobile
			SUKALUSI	Aplikasi Inklusi dan difabel
			Satu Data Desa	Pusat Data Desa
			Aplikasi UMKM	Aplikasi untuk UMKM
			Sukoshare	Aplikasi Penyimpanan berbasis Cloud
			NOC	Aplikasi monitoring jaringan
28	Sekretariat DPRD			
29	Bagian Pemerintahan			
30	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
31	Bagian Hukum	1	JDIH	
32	Bagian Perekonomian dan SDA			
33	Bagian Administrasi Pembangunan			
34	Bagian Kesejahteraan Rakyat			
35	Bagian Organisasi			
36	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan			
37	Bagian Umum			
	JUMLAH	47		

Tabel 14. Daftar Aplikasi yang Dikembangkan oleh Perangkat Daerah/Lembaga Lain

NO	PERANGKAT DAERAH	Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	Tahun mulai pemakaian
1	Dinas Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu	Online Single Submission (OSS)		BKPM RI	<a href="https://oss.go.id/portal/">https://oss.go.id/portal/</a>	2018
2	Dinas Perdagangan Koperasi & UMKM	E-retribusi		DISDAGKOP UKM KAB.. SUKOHARJO (Pasar Nguter dan Pasar Grogol)	<a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>	2018
		OSS (Online Single Submission)		Lembaga OSS BKPM	<a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>	2018/ 2019
3	Bappelbangda	SIPD		Kemendagri	<a href="https://sukoharjokab.sipd.kemendagri.go.id/">https://sukoharjokab.sipd.kemendagri.go.id/</a>	2020
		eplanning		Pemprov Jateng	<a href="http://eplanning.jatengprov.go.id">http://eplanning.jatengprov.go.id</a>	

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		Sistem Informasi Usulan Masyarakat Jawa Tengah		Pemprov Jateng	<a href="http://rembugan.jatengprov.go.id">rembugan.jatengprov.go.id</a>	
		Sistem Informasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		Pemprov Jateng	<a href="http://v2.simbankeu.com/">http://v2.simbankeu.com/</a>	
		Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		Pemprov Jateng	<a href="https://bankeu.bangda.jatengprov.go.id">https://bankeu.bangda.jatengprov.go.id</a>	
		Aplikasi Pengelolaan EPresensi		BKPP Kab. Sukoharjo	<a href="http://presensi.sukoharjokab.go.id/">http://presensi.sukoharjokab.go.id/</a>	

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a>	
		Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		LKPP	<a href="https://sirup.lkpp.go.id/">https://sirup.lkpp.go.id/</a>	
		Sistem Penilaian Kinerja ASN Pemerintah Kab. Sukoharjo		BKN	<a href="http://presensi.sukoharjokab.go.id/kinerja/">http://presensi.sukoharjokab.go.id/kinerja/</a>	
4	Badan Keuangan Daerah	SIMDA		BPKP		2015
		SIPD		KEMENDAGR I	<a href="http://Sukoharjokab.sipd.kemendagri.go.id">Sukoharjokab.sipd.kemendagri.go.id</a>	2021
		SIMGAJI		TASPEN		
		SIMDA BMD		BPKP		
		SIKD		Kemenkeu		

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		OMSPAN		Kemenkeu		
		ALADIN		Kemenkeu		
		SIMTRADA		Kemenkeu		
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	InDRA	BNPB	Aplikasi Android/IOS	2018	
		InaRISK	BNPB	Aplikasi Android/IOS	2017	
6	Dinas Sosial	E-PKH		Kemensos	epkh.kemensos.go.id	2019
		SIKSNG		Kemensos	siks.kemensos.go.id	2016
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SIAK		Kemendagri	Localhost (intern )	2011
		Benrollment (perekaman)		Kemendagri	-	2012
		Bcard (pencetakan ktpel)		Kemendagri	-	2015
		Konsolidasi Pusat		Kemendagri	https://ws-adminduk/konsolidasi-pusat/	2013
		Akone make/Pelayanan Online		Dispermadesdukcapil Prov Jateng	Akone Make ( android )	

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
8	Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja	SISNAKER	Selain berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi pelayanan yang ada, Sisnaker juga akan meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional	KEMNAKER	<a href="http://www.kemnaker.go.id">www.kemnaker.go.id</a>	2017
9	Inspektorat	TLHP BPK		BPK	<a href="https://eauditee.bpk.go.id/">https://eauditee.bpk.go.id/</a>	2019
		MCP KOPSURGAH		KPK	<a href="http://jaga.id">jaga.id</a>	2019

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		PMPRB		Kemenpan	<a href="http://pmprb.menpan.go.id">pmprb.menpan.go.id</a>	2019
		Simwas Prov		Inspektorat Prov	<a href="http://simwas.jatengprov.go.id">simwas.jatengprov.go.id</a>	2019
		Presensi		Absensi pegawai	<a href="http://presensi.sukoharjokab.go.id/">http://presensi.sukoharjokab.go.id/</a>	2019
		LHKPN		KPK	<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/">elhkpn.kpk.go.id/</a>	2017
		SIPD		Mengelola keuangan	<a href="https://sipd.kemendagri.go.id/">https://sipd.kemendagri.go.id/</a>	2021
		SIMDA		BPKP		2017
		Lapor SP4N		Kemendagri	<a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a>	2018
		Anjab E-Kinerja		Kemendagri		
					<a href="http://presensi.sukoharjokab.go.id/">http://presensi.sukoharjokab.go.id/</a>	
10	BKPP	SAPK	Pelayanan Kepegawaian (CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Mutasi)	BKN	<a href="https://sapk.bkn.go.id">https://sapk.bkn.go.id</a>	2017
		SSCN	Seleksi CPNS	BKN	<a href="https://sscnadmin.bkn.go.id">https://sscnadmin.bkn.go.id</a>	2018

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		Sijapti	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	KASN	<a href="https://sijapti.kasn.go.id">https://sijapti.kasn.go.id</a>	2019
		Docudigital	Pengelolaan Dokumen Digital untuk pelayanan kadministrasi kepegawaian	BKN	<a href="https://docudigital.bkn.go.id">https://docudigital.bkn.go.id</a>	2020
		e-Mutasi	Pengelolaan Mutasi Pegawai	Kemendagri	<a href="http://emutasi.otda.kemendagri.go.id/">http://emutasi.otda.kemendagri.go.id/</a>	2020
		e-Formasi	Pengelolaan Formasi Pegawai	Kemenpan dan RB	<a href="https://formasi.kemenpan.go.id/">https://formasi.kemenpan.go.id/</a>	2013
		Sijari On AKD	Analisis Kebutuhan Diklat	BPSDMD Prov. Jawa Tengah	<a href="https://akd.bpsdmd.jatengprov.go.id">https://akd.bpsdmd.jatengprov.go.id</a>	2017
		Evaluasi Pelatihan Online	Evaluasi Pelaksanaan Diklat	BPSDMD Prov. Jawa Tengah	<a href="https://evaluasi.bpsdmd.jatengprov.go.id/">https://evaluasi.bpsdmd.jatengprov.go.id/</a>	2017
		SIPD	Pengelolaan Perencanaan Kerja	Bappelbangda	<a href="http://perencanaan-sukoharjo.simda.net">http://perencanaan-sukoharjo.simda.net</a>	2017
11	DPUPR	SPION		DPMPSTP	<a href="http://spion.sukoharjokab.go.id">spion.sukoharjokab.go.id</a>	2020
		Sentuh tanahku			<a href="http://playstore/sentuhanaku">playstore/sentuhanaku</a>	2020

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		Gistaru		Kementrian ATR/BPN	<a href="http://gistaru.atrbpn.go.id">gistaru.atrbpn.go.id</a>	
12	DPKP	SIMDA KEUANGAN		BPKP	-	-
		SIMDA BARANG		BPKP	-	-
		SIPD		Kementraian Dalam Negeri	<a href="https://sukoharjokab.sipd.kemendagri.go.id/">https://sukoharjokab.sipd.kemendagri.go.id/</a>	-
		Sistem Informasi Bantuan Perumahan		Kementrian PU	<a href="https://sibaru.perumahan.pu.go.id/">https://sibaru.perumahan.pu.go.id/</a>	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	SIMDA KEU		BPK	-	2015
		SIMBADA		BPK	-	2015
		SIPD		Kemendagri	<a href="http://Sukoharjo.sipd.kemendagri.go.id">Sukoharjo.sipd.kemendagri.go.id</a>	2021
		SIRAJALIMBAH		KemenLHK	<a href="http://Plb3.menlhk.go.id">Plb3.menlhk.go.id</a>	2018
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Inlislite V.32	Perpustakaan Nasional RI	PHP 5.6 & Mysql/, Marida DB		2020
		SIKD	Disarpus Prov.Jateng	Jav, Mysql		2020

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
15	Dinas Pertanian dan Perikanan	SIPD	-	-	-	
		E-Monev DAK	-	-	-	
		SIRUP	-	-	-	
		LPSE	-	-	-	
		SIMONEV	-	-	-	
		E-SAKIP	-	-	-	
		SIMDA	-	-	-	
		SIMLUHTAN	-	-	-	
	E-proposal	-	-	-		
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAPODIK	KEMENDIKNAS	-	-	
		SIMDA KEUANGAN	KABUPATEN	-	-	
		SIMDA BMD	KABUPATEN	-	-	
17	Dinas Pangan	Simonstok		Kementan		2020
		Neraca		Kementan		2021
		Satgas pangan		Kemendagri	<a href="http://ketahananpangan.kemendagri.go.id">http://ketahananpangan.kemendagri.go.id</a>	2020
		Sislogda		Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng	enumeratorsislogda.com	2020

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		Panel harga pangan		Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng	panelhargapangan.com	2019
		Tepra		Administrasi pembangunan		2020
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SISKEUDES		BPKP	2016	Untuk Pengelolaan Keuangan Desa
		SIPADES		KEMENDAGR I	220	Untuk Pengelolaan Aset Desa
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Simda		BKD		
		Sim Gaji		BKD		
		E-presensi		BKPP		
		E-lapkin		BKPP		
		E-reporting		DWP		
		E-formasi		BKPP		
		Simpeg		BKPP		
20	Kesbangpol					

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
21	Satpol PP	SIM Satpol PP	Aplikasi informasi dan laporan tentang kondisi Satpol PP se Indonesia khususnya mengenai jumlah pegawai, jumlah aset dan tingkat pendidikan pegawainya	Kemendagri	SatpolPPkemendagri.go.id	2021
		SIMDA		Pemkab Sukoharjo		20
		SIRUP		LP2KP		2021
		SIPD		Kemendagri		2021
		BMD Online	Aplikasi yang dikembangkan untuk mengurus Barang /Aset Daerah (Bidang Aset BKD)	Pemkab Sukoharjo		2021
22	Kecamatan Sukoharjo	SIKS		Dinas Sosial	-	2018
		SIMDA		BKD Kab Skh		2017

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		JOGO TONGGO		Provinsi Jawa Tengah	jogotonggo.jatengprov.go.id	2020
		SIMPERUM		Provinsi Jawa Tengah	simperum.disperakim.jatengprov.go.id	2021
		KEMBANG DESA		Pengadilan Tinggi Jateng	kembangdesa.pt-semarang.go.id	2021
		SKUTER			skuter.sukoharjokab.go.id	2018
		E PRESENSI			presensi.sukoharjokab.go.id	2019
		SIPD			sipd.kemendagri.go.id	2021
		E KINERJA			presensi.sukoharjokab.go.id/kinerja	2021
		SIMRENJA				2013
		SIM PELAYANAN MASYARAKAT			tkpk-sukoharjo.org/pelayanan	2013
		SIMPEG		-	-	2014
		SIM KEPANGKATAN		-	-	2014
		LPSE				
		SIM GAJI		-	-	2012
23	Dinas Kesehatan					2013

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
24	RSUD	SIMDA Keuangan (Sistem Informasi Manajemen Daerah)	Aplikasi yang dapat digunakan oleh pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerah	Pemerintah kabupaten Sukoharjo	-	2010
		SIRANAP (Sistem informasi rawat inap)	Aplikasi yang menyajikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit	Kementrin kesehatan RI	<a href="https://yanke.kemkes.go.id/">https://yanke.kemkes.go.id/</a>	2018
		SISRUTE (Sistem informasi rujukan terintegrasi)	Aplikasi untuk media komunikasi dan informasi dalam proses rujukan pasien antar rumah sakit	Kementrian kesehatan RI	<a href="https:sisrute.kemkes.go.id/">https:sisrute.kemkes.go.id/</a>	2018

NO	PERANGKAT DAERAH	Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	Tahun mulai pemakaian
		SISMADAK (Sistem manajemen dokumen akreditasi)	Aplikasi untuk menyimpan dokumen yang berhubungan dengan akreditasi	KARS (kondisi akreditasi rumah sakit)	Local domain	2016
		SITT (Sistem informasi Tuberkulosis Terpadu)	Sistem informasi pencatatan dan pelaporan TB seara elektronik yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan	Kementerian kesehatan RI	<a href="http://sitt.kemkes.go.id">http://sitt.kemkes.go.id</a>	2016

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		Health Facilities Information System (HFIS) Sistem Informasi Manajemen Data Fasilitas Kesehatan BPJS	Aplikasi untuk monitoring dan pelaporan data faskes, meliputi data alamat praktek, penanggung jawab, jumlah dokter dan tenaga kesehatan lain, jam praktek, teknologi kedokteran dan informasi lainnya	BPJS Kesehatan	<a href="https://hfis.bpjs-kesehatan.go.id">https://hfis.bpjs-kesehatan.go.id</a>	2018
		LUPIS (Luar paket INA-CBG)	Menginput serta merekam data tagihan klaim untuk paket-paket yang tidak ditanggung oleh INA-CBG	BPJS Kesehatan	<a href="https://lupis.bpjs-kesehatan.go.id">https://lupis.bpjs-kesehatan.go.id</a>	2018

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		SIHA (Sistem informasi HIV AIDS)	Aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan HIVAIDS dan IIMS	Kementrian kesehatan RI	<a href="https://siha.kemkes.go.id">https://siha.kemkes.go.id</a>	-
		E-Klaim INACBG	Aplikasi untuk melakukan proses klaim playanan kesehatan di rumah sakit pada pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kementrian kesehatan RI	Local domain	2016

NO	PERANGKAT DAERAH	Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	Tahun mulai pemakaian
		RSTC (Sistem informasi pelayanan pasien BPJS ketenagakerjaan)	Aplikasi untuk pengeekan validasi data kepesertaan, melaporkan kasus kecelakaan yang mendapatkan pelayanan serta penagihan pembayaran biaya perawatan dan pengobatan peserta BPJS ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja	BPJS Ketenagakerjaan	<a href="https://tc.bpjsketenagakerjaan.go.id">https://tc.bpjsketenagakerjaan.go.id</a>	2014

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		Pelkes Online Inhealth (Sitem Informasi Pelayanan Pasien Inhealth)	Aplikasi untuk pengecekan validasi data kepesertaan, pengesahan dan peaporan pengobatan peserta asuransi mandiri inhealth	PT. Asuransi Jiwa Inhealth	<a href="https://pelkesonline.inhealth.go.id">https://pelkesonline.inhealth.go.id</a>	2017
		vClaim (Virtual claim BPJS kesehatan)	Aplikasi untuk pengecekan validasi data epesertaan, pengesahan dan pelaporan pengobatan peserta asuransi BPJS kesehatan	BPJS Kesehatan	<a href="https://vclaim.bpjs-kesehatan.go.id">https://vclaim.bpjs-kesehatan.go.id</a>	2017

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
25	DPPKBP3A	MORENA	Aplikasi untuk pelaporan DAK dan BOKB. Aplikasi ini bisa untuk upload data dan mendownload data dalam bentuk excel.	BKKBN	morena.bkkbn.go.id	
		Statistik Rutin	Aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka menyediakan informasi tentang Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mendownload	BKKBN	aplikasi.bkkbn.go.id/sr	

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
			laporan dalam bentuk XML, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF file dan Word dan bisa digunakan untuk melihat grafik perkembangan pencapaian peserta KB.			
		Simep KPAI	Sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaporan (SIMEP) KPAI. Aplikasi ini bisa untuk penginputan data.	KPAI	simepKPAI.com	

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		SIGA	Dapat mengintegrasikan aplikasi statistik rutin (pelayanan kontrasepsi, pengendalian lapangan) dan aplikasi pendataan keluarga. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mendownload file excel.	BKKBN	sigabkkbn.go.id	
		Sirika	Menerbitkan SPMB (surat perintah mengeluarkan barang) dan bisa untuk mengecek keadaan alkon. Bisa digunakan untuk	BKKBN	sirika.bkkbn.go.id	

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
			mendownload laporannya berupa PDF.			
		Stokku	Untuk pembuatan SBBK (surat bukti barang keluar) dan pengecekan keluar masuk alkon dan stok di Gudang. Bisa untuk mendownload laporannya berupa PDF.	BKKBN	Aplikasi bisa di download di playstore	
		PK21	Aplikasi pendataan keluarga 2021. Aplikasi ini bisa untuk mencetak dokumen dalam bentuk excel.	BKKBN	Pk21.bkkbn.go.id	

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
26	Dinas Perhubungan	BLUE (Bukti lulus uji elektronik)	Mencetak bukti lulus uji, sinkronisasi data dengan kemenhub, upload data ke kemenhub	KEMENHUB	Portalpk21.bkkbn.go.id	2020
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	SIMDA				
		SIMDA BMD				
		SIM GAJI				
		SIRUP				
		SPSE				
		SIPD				
28	Sekretariat DPRD	SIMDA		BKD		2017
		SIMDA BMD		BKD		2017
		SIM GAJI		BKD		
		SIRUP		BKD		
29	Bagian Pemerintahan	SIMDA		BKD	2015	

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
30	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE		LKPP	Lpse.sukoharjokab.go.id/eproc4	2012
31	Bagian Hukum					
32	Bagian Perekonomian dan SDA	SIKP		Dirjen Perbendaharaan		2017
		SIMDA		BKD		
		SIRUP		Bagian PBJ		
		SIPD		Kemendagri		2021
33	Bagian Administrasi Pembangunan	Sismon Tepra		LKPP		2016
		Simbangda		Biro Administrasi Pembangunan Daerah Prov. Jateng		
34	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SIMDA		Badan Keuangan Daerah		2014
		SIPD		Kementerian Dalam Negeri	sipd.go.id	2020

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		SIRUP		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	sirup.lkpp.go.id	
		E-Presensi		BKPP Kab. Sukoharjo	presensi.sukoharjokab.go.id	2019
		E-Kinerja		Badan Kepegawaian Nasional	presensi.sukoharjokab.go.id/kinerja	2021
35	Bagian Organisasi	e-Formasi 4.1	Mempermudah penyusunan kebutuhan formasi pegawai, kelas jabatan dan sasaran kerja pegawai	Kemenpan	Formasi.menpan.go.id	2020
		SIMONA	Penyusunan kebutuhan formasi pegawai, kelas jabatan dan sasaran kerja pegawai	Kemendagri	simona.kemendagri.go.id	

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
		PMPRB On Line	Mempermudah koordinasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja	Kemenpan	pmprb.menpan.go.id	
		e-SAKIP REVIU	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran	Kemenpan	esr.menpan.go.id	
		SSIPPN	Terpublikasinya informasi pelayanan public	Kemenpan	sipp.menpan.go.id	
		EKPP	Terpublikasinya informasi pelayanan public	Pemprov	ekpp.sippjateng.go.id	
		SINOVIK	Media untuk kompetisi inovasi pelayanan public	Kemenpan	sinovik.menpan.go.id	

NO	PERANGKAT DAERAH					Tahun mulai pemakaian
		Nama Aplikasi	Manfaat Aplikasi	Instansi pengembang aplikasi	Jika web based alamat webnya	
36	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan					
37	Bagian Umum					

### 3.3. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo

#### 3.3.1. Visi

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur”

#### 3.3.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Sukoharjo tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi;
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

## BAB IV

### TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN SUKOHARJO

#### 4.1. Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sukoharjo berperan sebagai “IT” nya Kabupaten Sukoharjo. Peran yang bisa diambil oleh Dinas Kominfo adalah sebagai *support* dan *enabler*. *Support* berarti memberi bantuan dan *handling* jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan *enabler* berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo selaras dengan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Sukoharjo tahun 2021, target pengembangan SPBE selama 5 tahun mulai tahun 2022 – 2026 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai 3,54 (Sangat Baik) menjadi 3,84 (Sangat Baik).

Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat di tabel 15 berikut.

*Tabel 15. Target Pengembangan Indeks SPBE*

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2019	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2026	Uraian Target
Kebijakan	3,24	3,84	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata</li> </ul>
Kebijakan Tata Kelola	3,14	3,84	

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE Tahun 2019	Target Nilai Indeks SPBE Tahun 2026	Uraian Target
Kebijakan Layanan	3,3	3,84	kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
Tata Kelola	3,29	3,84	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait</li> </ul>
Kelembagaan	3,00	3,84	
Strategi dan Perencanaan	3,50	3,84	
TIK	3,33	3,84	
Manajemen	-	3,84	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses manajemen SPBE dan Audit TIK dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait</li> </ul>
Penerapan Manajemen SPBE	-	3,84	
Audit TIK	-	3,84	
Layanan	3,76	3,84	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan</li> <li>Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain</li> </ul>
Layanan Administrasi Pemerintahan	3,71	3,84	
Layanan Publik	3,83	3,84	
INDEK SPBE	3,54	3,84	Sangat Baik

#### 4.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat di gambar 3, yang terdiri dari 4 kategori, yaitu:

- Tata Kelola SPBE;
- Layanan SPBE;

- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- Sumber Daya Manusia SPBE.

Tata Kelola	Layanan	TIK	SDM
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Arsitektur SPBE</li> <li>• Kebijakan SPBE</li> <li>• Evaluasi SPBE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survey Pengguna SPBE</li> <li>• Portal Pelayanan Publik</li> <li>• Portal Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Manajemen Layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Data</li> <li>• Jaringan Intra</li> <li>• Sistem Penghubung</li> <li>• Layanan Berbagi Pakai</li> <li>• Portal Data</li> <li>• Sistem Keamanan Informasi</li> <li>• Teknologi Kecerdasan Buatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi Literasi</li> <li>• Kapasitas ASN</li> <li>• Forum Kolaborasi SPBE</li> </ul>

*Gambar 1. Inisiatif Strategis*

#### 4.2.1. Tata Kelola SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari:

##### 1. Pembangunan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

Jenis Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo terdiri atas:

- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di antar instansi OPD;
- Arsitektur SPBE yang disusun oleh masing-masing instansi OPD dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi OPD.

Pembangunan sistem arsitektur SPBE diperlukan untuk mengelola informasi terkait arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo agar memudahkan dalam pengelolaan arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo

##### 2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

- Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE

Provinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah;

- c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

### 3. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

#### a. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

#### b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

#### c. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

e. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

f. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

g. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

h. Manajemen Layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.

Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

#### 4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi:

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Sukoharjo;
- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- d. Setiap instansi OPD di Kabupaten Sukoharjo dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri; dan
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

##### 4.2.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

#### 1. Survey Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
- b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;
- c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Sukoharjo.

## 2. Portal Layanan Publik Terintegrasi

- a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
- b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Sukoharjo yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
- d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
- f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
- g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

## 3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi

- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;

- b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;
- c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;
- d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
- e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

#### 4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan

- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif;
- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
  - 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
  - 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;

3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.

d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *Internet of Things (IoT)*.

#### 4.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

##### 1. Penyediaan Pusat Data

- a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Sukoharjo;
- b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Sukoharjo;
- c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfo yang memenuhi standar Pusat Data;
- d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

##### 2. Penyediaan Jaringan Intra

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah;
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;
- c. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:

- 1) jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
  - 2) Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
  - 3) Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (*Virtual Private Network*).

### 3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
- b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE;
- c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT;
- d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

### 4. Penyediaan akses Layanan SPBE

- a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE;
- b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta;
- c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai;

- d. Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Sukoharjo yang belum terjangkau.
5. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
- a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
  - b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia;
  - c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi *IoT*, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data;
  - d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
    - 1) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
    - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.
6. Pembangunan Portal Data Daerah
- a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
  - b. Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia;
  - c. Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

## 7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah

- a. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- b. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah mencakup:
  - 1) Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
  - 2) Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
  - 3) Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.

## 8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan

- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;
- b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;
- c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;
- d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

#### 4.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

1. Promosi literasi SPBE
  - a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat;
  - b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
  - c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.
2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
  - a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN;
  - b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
    - 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
    - 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE);
    - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
    - 4) pengembangan pola renumerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
    - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
  - a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;

- b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
- 1) penyampaian ide/ gagasan SPBE;
  - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
  - 3) peningkatan kompetensi teknis;
  - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
  - 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
  - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
- c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

## BAB V

### ANALISIS KESENJANGAN

#### 5.1. Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Pemutakhiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (*Standar Operational Procedure*) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksekusi di lapangan. Dalam Kebijakan Internal SPBE, terdiri dari 2 jenis aspek kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Kebijakan Internal Layanan SPBE

*Tabel 16. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan*

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan

#### 5.2. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, *stakeholder*, perencanaan dan *enabler* (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefiniskan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat

bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target target yang telah ditetapkan.

*Tabel 17. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola*

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kelembagaan	Belum optimalnya Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE	Memiliki tupoksi yang disahkan dan selalu berkoordinasi	Perlu dibuat lengkap dengan tupoksinya, disahkan dan disosialisasikan
2	Strategi dan Perencanaan	Belum memiliki Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	Ada, disahkan dan disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
3	TIK	Memiliki sebagian komponen TIK yang dibutuhkan serta yang ada perlu dioptimalkan	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Perlu dikembangkan, dikelola dan dijadikan agen perubahan proses bisnis

### 5.3. Domain Manajemen SPBE

Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE terdiri dari proses manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE serta melaksanakan audit TIK secara berkala. Analisis kesenjangan manajemen SPBE ditunjukkan oleh tabel 18 berikut.

Tabel 18. Analisis Kesenjangan Domain Manajemen SPBE

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Penerapan Manajemen SPBE	Belum seluruhnya dilaksanakan	Dilaksanakan proses manajemen SPBE secara berkala	Perlu dibuat pedoman untuk pelaksanaan manajemen SPBE, dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala
2	Audit TIK	Belum dilaksanakan secara berkala	Dilaksanakan proses audit TIK secara berkala	Perlu dibuat pedoman pelaksanaan audit TIK, dan dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala

#### 5.4. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan output dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya *single entry* dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata naskah dinas dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan juga terhubung dalam RPJMN.

Tabel 19. Analisis Kesenjangan Domain Layanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data

## BAB VI

### PETA RENCANA SPBE KABUPATEN SUKOHARJO

Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan..

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

- Tahapan pembangunan Fondasi SPBE tahun 2022 – 2023; dan
- Tahapan pengembangan SPBE tahun 2024 – 2026.



*Gambar 2. Tahapan Rencana Strategis Pengembangan SPBE*

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2022 - 2023 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo;
2. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. Kapasitas SDM TIK ( Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;

7. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
8. Manajemen Layanan SPBE (ITSM atau *IT Service Management*);
9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD); dan
10. Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2024 - 2026 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;
2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo mulai tahun 2022 – 2026. Berikut Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 – 2026 dapat dilihat di tabel 20.

### 6.1. Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo ( 2022 – 2026 )

Tabel 20. Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo ( 2022 – 2026 )

No	Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	1.1	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Sukoharjo	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		1.2	Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Sukoharjo	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓		
		1.3	Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Sukoharjo	Bappelbangda dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓		
		1.4	Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Sukoharjo	Dinas Kominfo	✓	✓	✓		
		1.5	Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo	Dinas Kominfo	✓	✓			
		1.6	Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Dinas Kominfo	✓	✓			
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sukoharjo (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	2.1	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sukoharjo	Sekretariat Daerah	✓				
3	Penguatan Kebijakan SPBE (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1-	3.1	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan	✓	✓			

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	Sukoharjo	Dinas Kominfo					
3.2		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	✓	✓			
3.3		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data	Bappelbangda, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	✓		✓		
3.4		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	✓	✓			
3.5		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Pusat Data	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	✓	✓			
3.6		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	✓	✓			
3.7		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	✓		✓		
3.8		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	✓		✓		
3.9		Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi (2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.0 1.1 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	✓		✓		

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)						
		3.10 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	✓		✓		
4	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	4.1 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.2 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.3 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.4 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.5 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.6 Evaluasi dan optimalisasi manajemen layanan	Bagian Organisasi	✓	✓	✓	✓	✓
		4.7 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		4.8 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE	Dinas Kominfo dan BKPP	✓	✓	✓	✓	✓
		4.9 Audit TIK Kabupaten Sukoharjo	Dinas Kominfo	✓	✓		✓	
5	Survey Pengguna SPBE (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.2 – Monitoring Opini dan Aspirasi Publik)	5.1 Adanya survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan	Dinas Kominfo, Bagian Organisasi	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
			pemerintahan						
6	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 – Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik)	6.1	Adanya pengembangan portal pelayanan publik Kabupaten Sukoharjo	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
7	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 – Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik)	7.1	Adanya pengembangan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	Bappelbangda, BKD, Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		7.2	Adanya pengembangan integrasi Kepegawaian	BKPP, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		7.3	Adanya pengembangan integrasi Kearsipan (e-dokumen persuratan)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Kominfo	✓	✓			
		7.4	Adanya pengembangan integrasi Pengaduan Publik	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		7.5	Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
8	Penyelenggaraan Manajemen Layanan (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1-	8.1	Adanya portal pusat layanan internal ( <i>service desk</i> )	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-Government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)								
9	Pengembangan Pusat Data (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	9.1	Adanya pengembangan pusat data (baik berbasis pusat data nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional <i>data center</i>	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah)	10.1	Adanya evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD dan UPT	Dinas Kominfo	✓	✓			
11	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.8 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	11.1	Adanya pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah	Dinas Kominfo dan OPD Terkait	✓	✓	✓	✓	✓
12	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Sukoharjo (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan	12.1	Tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Intra Pemerintah Daerah)								
13	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10– Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	13.1	Tersedianya layanan Cloud untuk Kabupaten Sukoharjo	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
14	Pembangunan Portal Data Daerah (2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3– Membangun Metadata Statistik Sektoral)	14.1	Adanya pengembangan portal data Kabupaten Sukoharjo	Dinas Kominfo dan Bappelbangda	✓	✓	✓	✓	✓
15	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah (2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3 – Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik)	15.1	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan ( <i>nonrepudiation</i> ) sumber daya terkait data dan informasi	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓
		15.2	Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
16	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan (2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1 – Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral)	16.1	Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Dinas Kominfo dan OPD terkait				✓	✓
		16.2	Adanya penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	Dinas Kominfo dan OPD terkait				✓	✓
17	Promosi Literasi SPBE (5.04.02.2.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	17.1	Adanya Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	BKPP dan Dinas Kominfo Bidang Komunikasi	✓	✓	✓	✓	✓
18	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE (5.04.02.2.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	18.1	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE (Pranata Komputer)	BKPP dan Sekretariat Dinas Kominfo	✓	✓	✓		
		18.2	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	BKPP dan Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

No	Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
					2022	2023	2024	2025	2026
19	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan Non pemerintah (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.8 – Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan)	19.1	Adanya Forum Kolaborasi SPBE	Dinas Kominfo	✓	✓	✓	✓	✓

## BAB VII

### DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Kabupaten Sukoharjo yang disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Program 1.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	1.1
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo
Tahun	2022 – 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis</li> <li>• Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun dokumen arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang disepakati seperti BPMN (<i>Business Process Modeling and Notation</i>)</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD Inovasi Proses Bisnis</li> <li>• Melakukan FGD Review dan evaluasi Peta Proses Bisnis</li> <li>• Implementasi proses bisnis digital (workflow, authorization), dan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik untuk semua kebijakan dan SOP</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal (Permen PANRB 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah).</li> <li>• Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal.</li> <li>• Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik.</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reuiu dan evaluasi Inovasi.</li> </ul>

Program 1.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	1.2
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo
Tahun	2022 – 2024
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan</li> <li>• Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Sukoharjo</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD revidu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur layanan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Sukoharjo</li> <li>• Bukti undangan rapat revidu dan evaluasi arsitektur layanan SPBE</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.</li> <li>• Dokumentasi Arsitektur Layanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.</li> </ul>

Program 1.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen  
Arsitektur Data Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	1.3
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo
Tahun	2022-2024
Penanggungjawab	Bappelbangda dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Data</li> <li>• Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Sukoharjo</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur data</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Sukoharjo</li> <li>• Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur data</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Data.</li> <li>• Dokumentasi Arsitektur Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur data.</li> </ul>

Program 1.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	1.4
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo
Tahun	2022 - 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi</li> <li>• Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Sukoharjo</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur aplikasi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Sukoharjo</li> <li>• Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur aplikasi</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur aplikasi.</li> <li>• Dokumentasi arsitektur aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur aplikasi.</li> </ul>

Program 1.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	1.5
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur</li> <li>• Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> <li>• Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Sukoharjo</li> <li>• Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur infrastruktur</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur infrastruktur, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur infrastruktur.</li> <li>• Dokumentasi arsitektur infrastruktur yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.</li> </ul>

Program 1.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	1.6
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Sukoharjo
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo Bidang Komunikasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi</li> <li>• Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro , sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah</li> <li>• Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE.</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi SPBE Kabupaten Sukoharjo</li> <li>• Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur keamanan informasi</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur keamanan informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur keamanan informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur keamanan informasi.</li> <li>• Dokumentasi arsitektur keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.</li> </ul>

Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE  
Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	2.1
Nama Program	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sukoharjo
Tahun	2022 - 2022
Penanggungjawab	Setda/Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Menentukan Tupoksi Tim</li> <li>• Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE</li> <li>• Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut</li> <li>• Menerbitkan SK Tim SPBE</li> <li>• Membuat dokumen tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Membuat laporan berkala Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Penyediaan sarana komunikasi dan kolaborasi</li> <li>• Sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• FGD reuiu dan evaluasi program kerja Tim Koordinasi SPBE</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Tim Koordinasi SPBE, foto dan dokumen lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE beserta tugas/program kerja</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan/atau tangkapan layar</li> <li>• Foto dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan tugas seluruh unit kerja/perangkat daerah</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan reuiu atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE</li> </ul>

Program 3.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	3.1
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2023
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi isi kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini mencakup tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE antar OPD dan mencakup seluruh OPD, kolaborasi penerapan SPBE antar pemerintah daerah, propinsi dan pusat</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik ( Kajian akademis )</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sukoharjo</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait TIM Koordinasi SPBE yang sudah disahkan</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE</li> </ul>

Program 3.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE

Kode Program	3.2
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2024
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu serta isi kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait kebijakan Arsitektur SPBE dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan, serta mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik ( Kajian akademis )</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan penetapan dan kebijakan yang melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Arsitektur SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusat.</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SBPE.</li> </ul>

Program 3.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data

Kode Program	3.3
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2024
Penanggungjawab	Bappelbangda, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu, serta isi kebijakan Manajemen Data dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik ( Kajian akademis )</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Data</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait manajemen data yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian proses pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut. Lingkup pengaturan yang tercantum melingkupi Kebijakan dan Panduan Teknis Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi. Penetapan Definisi, Ruang Lingkup dan Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen data</li> </ul>

Program 3.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE

Kode Program	3.4
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dengan komponen lengkap meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan Informasi dan Audit TIK</li> <li>• Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Peta Rencana SPBE</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Peta Rencana SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan Propinsi, maupun dengan pusat</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SPBE</li> </ul>

Program 3.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data

Kode Program	3.5
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Menetapkan Standar Tingkatan/Rating Pusat Data</li> <li>• Membuat Pedoman Teknis Pengelolaan Operasional Pusat Data</li> <li>• Membuat kebijakan tentang interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional</li> <li>• Membuat SOP Pusat Data</li> <li>• Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Pusat Data</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait layanan pusat data yang telah ditetapkan</li> <li>• Dokumen pedoman pengelolaan operasional pusat data dan pedoman penggunaan layanan pusat data untuk seluruh unit kerja</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan pusat data</li> </ul>

Program 3.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra

Kode Program	3.6
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Pembuatan Kebijakan dan SOP Penggunaan Jaringan Intra</li> <li>• Sosialisasi Penggunaan Layanan Jaringan Intra</li> <li>• Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait pengoperasian jaringan intra yang mengatur tentang interkoneksi layanan jaringan intra yang telah ditetapkan</li> <li>• Pengaturan penggunaan layanan jaringan intra instansi untuk seluruh unit kerja</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra</li> </ul>

Program 3.7. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kode Program	3.7
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, penanggungjawab dan pelaksana kebijakan, serta mencakup interkoneksi dengan sistem penghubung layanan instansi</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Pembuatan kebijakan dan SOP penggunaan Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Sosialisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkan.</li> <li>• Pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.</li> </ul>

Program 3.8. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi

Kode Program	3.8
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Pembangunan Aplikasi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan tentang pembangunan aplikasi yang sudah ditetapkan</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait pembangunan aplikasi</li> </ul>

Program 3.9. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	3.9
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi
	2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1 : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mengatur secara lengkap ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk seluruh OPD</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Membuat SOP dan Pedoman Keamanan Informasi</li> <li>• Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Keamanan Informasi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait keamanan informasi yang telah ditetapkan</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi.</li> </ul>

Program 3.10. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK

Kode Program	3.10
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2022, 2024
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN</li> <li>• Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mencakup pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan)</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Membuat pedoman teknis Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan</li> <li>• Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Audit TIK</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan. Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan).</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait audit TIK</li> <li>• Notulensi rapat hasil pmutakhiran kebijakan internal</li> <li>• Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan</li> </ul>

## Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko

Kode Program	4.1
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman/kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan permenPAN RB Nomor 5 Tahun 2020</li> <li>• Melakukan identifikasi dan menyusun daftar risiko SPBE</li> <li>• Melakukan asesmen risiko SPBE</li> <li>• Melakukan analisis dan pengendalian risiko SPBE</li> <li>• Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE</li> <li>• Melaksanakan proses pengendalian risiko sesuai dengan hasil rekomendasi</li> <li>• Melakukan evaluasi manajemen risiko</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti dokumen penetapan program kerja (renja) yang terencana/terarah terkait Manajemen Risiko SPBE.</li> <li>• Bukti undangan, MoM, dan output eksekusi</li> <li>• Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari permenpanRB no 5/2020, sudah ditetapkan.</li> <li>• Bukti Output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE</li> <li>• Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah</li> <li>• Notulensi/catatan hasil reuiu dan evaluasi secara berkala</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE</li> <li>• Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE.</li> </ul>

## Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data

Kode Program	4.2
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman manajemen data berdasarkan PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020</li> <li>• Menyusun arsitektur data</li> <li>• Menyusun desain dan model data</li> <li>• Menentukan struktur fisik penyimpanan data dan pengelolaannya</li> <li>• Memastikan keamanan data yang meliputi <i>confidentiality</i>, <i>integrity</i> dan <i>availability</i> data</li> <li>• Menyusun dan menerapkan integrasi dan interoperability data</li> <li>• Melakukan pengelolaan data yang berupa file dan dokumen non elektronik agar dapat diakses dan diintegrasikan dengan data elektronik</li> <li>• Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas dan standarisasi data berbagi pakai (data referensi dan master data)</li> <li>• Melakukan pengelolaan <i>data warehouse</i> dan <i>data lake</i> yang digunakan untuk proses analisis data sebagai data laporan dan analisis pendukung pengambilan keputusan</li> <li>• Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata</li> <li>• Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)</li> <li>• Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.</li> <li>• Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data</li> <li>• Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja.</li> <li>•</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan</li> </ul>

	<p>manajemen data</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data</li><li>• Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data</li></ul>
--	--

## Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK

Kode Program	4.3
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman manajemen aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK)</li> <li>• Menyusun perencanaan aset TIK</li> <li>• Melakukan manajemen pengadaan aset TIK</li> <li>• Melakukan manajemen operasional dan perawatan aset TIK</li> <li>• Melakukan monitoring aset ITK</li> <li>• Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK</li> <li>• Melakukan manajemen pembuangan aset TIK yang sudah tidak terpakai</li> <li>• Membuat sistem informasi manajemen aset TIK</li> <li>• Integrasi portofolio layanan SPBE dengan aset TIK</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Renja terkait manajemen Aset TIK</li> <li>• Bukti pelaksanaan pengendalian Manajemen Aset TIK yang sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK</li> <li>• Pedoman manajemen aset TIK formal yang sudah ditetapkan.</li> <li>• Dokumen register/daftar aset TIK (terbatas di unit TIK)</li> <li>• Dokumen register/daftar aset TIK di seluruh unit kerja.</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen aset TIK</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK</li> <li>• Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK</li> </ul>

## Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan

Kode Program	4.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman manajemen perubahan</li> <li>• Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber</li> <li>• Menggunakan dan mengkesploitasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna</li> <li>• Mengumpulkan informasi tambahan dan memperkaya dengan lebih banyak wawasan</li> <li>• Berbagi pengetahuan dan wawasan</li> <li>• Menilai informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi</li> <li>• Membangun pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak memakai lagi pengetahuan yang sudah usang</li> <li>• Membangun sistem manajemen pengetahuan (<i>Knowledge Management System</i>) dalam bentuk sistem informasi</li> <li>• Penerapan pedoman dengan menggunakan sistem atau aplikasi manajemen pengetahuan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan</li> <li>• Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan" Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Pengetahuan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya</li> <li>• Dokumen renja terkait manajemen pengetahuan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan</li> <li>• Pedoman formal mengenai manajemen pengetahuan.</li> <li>• Aplikasi manajemen pengetahuan yang</li> </ul>

	<p>digunakan (manual/screenshot/video/demo)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bukti penerapan Manajemen Pengetahuan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Pengetahuan yang telah ditentukan/ditetapkan</li><li>• Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja</li><li>• Dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan</li><li>• Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya)</li></ul>
--	--

## Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan

Kode Program	4.5
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pedoman manajemen perubahan</li> <li>• Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu ditingkatkan</li> <li>• Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan</li> <li>• Menyusun perencanaan perubahan</li> <li>• Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan</li> <li>• Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan</li> <li>• Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan</li> <li>• Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus</li> <li>• Mengembangkan sistem manajemen perubahan</li> <li>• Menerapkan pedoman dengan sistem atau aplikasi manajemen perubahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan</li> <li>• Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Perubahan</li> <li>• Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya</li> <li>• Dokumen renja terkait manajemen perubahan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen perubahan.</li> <li>• Pedoman formal mengenai manajemen perubahan.</li> <li>• Aplikasi manajemen perubahan yang</li> </ul>

	<p>digunakan (manual/screenshot/video/demo)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bukti penerapan Manajemen Perubahan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Perubahan yang telah ditentukan/ditetapkan</li><li>• Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja</li><li>• Dokumen reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan</li><li>• Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan (termasuk aplikasinya)</li></ul>
--	--

## Program 4.6. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan

Kode Program	4.6
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan (merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas)
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dokumen kebijakan Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Membuat dokumen siklus layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi )</li> <li>• Membuat SOP disetiap siklus nya dengan RACI (<i>Responsible, Accountable, Consult, Inform</i>) bagi personel yang mengampunya</li> <li>• Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala</li> <li>• Pengembangan sistem manajemen layanan SPBE (Helpdesk, manajemen insiden, manajemen kapasitas, manajemen konfigurasi)</li> <li>• Implementasi sistem Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Penerapan SLA Layanan SPBE</li> <li>• Penerapan Manajemen Layanan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen layanan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi</li> <li>• Review dan evaluasi penerapan aplikasi manajemen pengetahuan</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan sistem manajemen layanan SPBE berdasarkan hasil reviu dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Layanan SPBE</li> <li>• Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen renja terkait Manajemen Layanan SPBE, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus Layanan SPBE</li> <li>• Prosedur formal manajemen layanan yang mencakup semua proses manajemen layanan.</li> <li>• Aplikasi manajemen layanan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo).</li> <li>• Dokumen Katalog Layanan dan SLA layanan</li> <li>• Aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video).</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi manajemen layanan</li> <li>• Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya)</li> </ul>
--	--

Program 4.7. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE

Kode Program	4.7
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan BKPP
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan konsep penerapan manajemen SDM SPBE</li> <li>▪ Memahami Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE</li> <li>▪ Mengambil acuan/referensi Kompetensi TIK yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia )</li> <li>▪ Menentukan <i>Job Role</i> dalam penyelenggaraan SPBE</li> <li>▪ Menentukan kompetensi untuk <i>Job Role</i> Penyelenggara SPBE</li> <li>▪ Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara SPBE</li> <li>▪ Melaksanakan program pengembangan SDM SPBE (asesmen dan pelatihan)</li> <li>▪ Penerapan Assessment Kompetensi SDM SPBE</li> <li>▪ Pengembangan SDM SPBE</li> <li>▪ Monitoring Kinerja SDM SPBE dan Kompetensinya</li> <li>▪ Review dan evaluasi penerapan manajemen</li> </ul>

	<p>SDM SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan revisi penyempurnaan kerangka kompetensi SDM SPBE berdasarkan hasil reviu dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumentasi perencanaan/formasi SDM</li> <li>▪ Dokumen Kerangka Kompetensi SDM SPBE yang sudah ditetapkan</li> <li>▪ Dokumen roadmap pelatihan</li> <li>▪ Laporan pemenuhan/realisasinya</li> <li>▪ Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi kinerja/kompetensi SDM TIK.</li> </ul>

Program 4.8. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	4.8
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan/Perbaikan dokumen kebijakan manajemen keamanan informasi SPBE</li> <li>• Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI</li> <li>• Menemukan gap analysis untuk tindakan koreksi yang harus dilakukan.</li> <li>• Penerapan kendali dan protokol keamanan informasi sistem informasi</li> <li>• Menyusun kebijakan, standar dan SOP untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi</li> <li>• Menyusun SPM/SLA dan SOP Pelayanan Keamanan Informasi</li> <li>• Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Keamanan Informasi</li> <li>• Pembentukan CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>)</li> <li>• Penyusunan dokumen <i>Cyber Security Incident Response Plan</i></li> <li>• Pendampingan dan pemberian saran mengenai hukum dan legalitas</li> <li>• Perbaikan dokumen Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE (<i>Information</i></li> </ul>

	<p><i>sensitivity policy, password policy, internal control policy, dsb), Penyusunan SOP Manajemen Insiden, Penyusunan SOP Proteksi Aset SPBE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan proses pengendalian Keamanan Informasi melalui kebijakan formal</li> <li>• Penetapan kebijakan strategis keamanan informasi kepada seluruh unit kerja</li> <li>• Review dan evaluasi penerapan keamanan informasi</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan manajemen keamanan informasi berdasarkan hasil reuiu dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draf/rancangan penerapan Keamanan Informasi</li> <li>• Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi</li> <li>• Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi</li> <li>• Dokumentasi kegiatan pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan program dimana pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian atau seluruh unit kerja</li> <li>• Bukti penetapan/pengesahan formal (permen/perban/pegub/perwal) atas manajemen keamanan informasi (umumnya disebut dokumen “Manual SMKI”).</li> <li>• Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE keapada seluruh unit kerja.</li> <li>• Notulen/output atas evaluasi</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi</li> <li>• Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi</li> <li>• Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi</li> </ul>

## Program 4.9. Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	4.9
Nama Program	Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2023 dan 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan komponen audit TIK (keamanan, aplikasi, infrastruktur)</li> <li>• Membuat pedoman audit infrastruktur sesuai Perban BPPT</li> <li>• Membuat pedoman audit aplikasi sesuai Perban BPPT</li> <li>• Membuat pedoman audit keamanan sesuai Perban BSSN</li> <li>• Memilih lembaga Audit TIK (BSSN atau lembaga kredibel)</li> <li>• Melakukan audit (secara berkala)</li> <li>• Menganalisa hasil audit</li> <li>• Membuat dokumen audit</li> <li>• Melakukan tindakan koreksi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya renja terkait kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan.</li> <li>• Adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali).</li> <li>• Laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal</li> <li>• Rujukan pedoman audit infrastruktur</li> <li>• Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi</li> <li>• Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.</li> </ul>

Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan

Kode Program	5.1
Nama Program	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.2 : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Inisiatif Strategis	Survei Pengguna SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat metode survei ( elektronik atau manual )</li> <li>• Menentukan kuesioner survei</li> <li>• Mengumpulkan data</li> <li>• Melakukan analisa data hasil survei</li> <li>• Menampilkan hasil survei</li> </ul>

Program 6.1. Pengembangan Integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	6.1
Nama Program	Pembentukan integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2022 - 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur proses bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja</li> <li>• Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis <i>web service</i></li> <li>• Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik</li> <li>• Menerapkan <i>Single Sign On</i></li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi dengan Unit pengelola TIK.</li> </ul>

Program 7.1. Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi )

Kode Program	7.1
Nama Program	Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Bappelbangda, BKD, Biro Pengadaaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Memastikan bisnis proses telah terintegrasi (perencanaan, penganggaran, SAKIP, MONEV )</li> <li>• Memastikan adanya aplikasi untuk tiap proses</li> <li>• Menggunakan sistem penghubung</li> <li>• Atau membangun single database untuk seluruh proses</li> <li>• Membangun satu pintu masuk untuk kegiatan perencanaan.</li> <li>• Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur</li> </ul>

	<p>aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.</li> <li>• Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"</li> </ul>
--	---

### Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian

Kode Program	7.2
Nama Program	Pengembangan Integrasi Kepegawaian
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BKPP, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro</li> <li>• Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada</li> <li>• Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan</li> <li>• Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah</li> <li>• Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian</li> <li>• Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Kepegawaian</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)</li> </ul>

	<p>untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.</li> <li>• Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE</li> </ul>
--	--

### Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan

Kode Program	7.3
Nama Program	Pembentukan Integrasi Kearsipan

	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan undang undang arsip nasional</li> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Melakukan konversi elektronik dari dokumen atau arsip kertas</li> <li>• Menerapkan sistem manajemen arsip secara elektronik</li> <li>• Mengintegrasikan dengan aplikasi perkantoran dan kepegawaian</li> <li>• Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi kearsipan Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.</li> <li>• Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"</li> </ul>
--	---

#### Program 7.4. Pembentukan integrasi Pengaduan Publik

Kode Program	7.4
Nama Program	Pembentukan integrasi Pengaduan Publik
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Menentukan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi)</li> <li>• Meng-integrasikan sistem OPD yang masuk dalam pengaduan (Kerusakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya)</li> <li>• Membuat sistem penyaringan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi OPD yang sesuai</li> <li>• Melakukan pencatatan (<i>log</i>)</li> <li>• Memonitor waktu respon</li> <li>• Tracking penyelesaian pengaduan</li> <li>• Eskalasi pengaduan dengan kriteria</li> <li>• Evaluasi pengaduan secara berkala</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download</li> </ul>

	<p>(unduh) dokumen terkait Pengarsipan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.</li> <li>• Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE</li> </ul>
--	--

Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan

Kode Program	7.5
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis

	Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi dan arsitektur data milik pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi</li> <li>• Memastikan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu</li> <li>• Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile</li> <li>• Menerapkan SSO (<i>Single Sign On</i>) pada portal yang ada</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi).</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.</li> <li>• Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.</li> <li>• Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE</li> <li>• Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE</li> </ul>
--	--

Program 8.1. Pembentukan portal pusat layanan internal (*service desk*)

Kode Program	8.1
Nama Program	Pembentukan portal pusat layanan internal ( <i>service desk</i> ) terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi

	baru
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1- Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e-Government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2022 - 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun perencanaan dan membangun portal pusat layanan internal yang terdiri dari terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan/kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru</li> <li>• Mendidik SDM yang memahami konsep IT Service Management ( ITSM )</li> <li>• Membuat SLA layanan</li> <li>• Menerapkan sistem <i>Service Desk</i> dengan prinsip <i>Single Point of Contact</i></li> <li>• Melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan dan masalah yang ada</li> <li>• Melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan SLA</li> </ul>

Program 9.1. Pengembangan pusat data dengan standar internasional *data center*

Kode Program	9.1
Nama Program	Penyediaan pusat data dengan standar internasional <i>data center</i>
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10 : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Pusat Data
Tahun	2022 -2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<p>Menggunakan Pusat Data Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengajuan layanan IaaS ke Kementerian Kominfo</li> <li>• Melakukan proses migrasi server dan layanan ke PDN</li> </ul> <p>Menggunakan Pusat Data (<i>Data Center</i>) sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan asesmen <i>data center</i> berbasis TIA 942 , untuk mengukur kelayakan rated internasional</li> <li>• Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen</li> <li>• Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan</li> <li>• Perbaikan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM</li> <li>• Pembuatan Kebijakan pengelolaan operasional pusat data.</li> <li>• Sosialisasi dan Harmonisasi layanan pusat data ke seluruh unit kerja</li> <li>• Pembuatan prosedur pengoperasian layanan pusat data.</li> <li>• Pembuatan prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data</li> <li>• Pengembangan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Layanan Pusat Data Nasional.</li> <li>• FGD review dan evaluasi layanan pusat data</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan layanan pusat data berdasarkan hasil reuiu dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katalog (Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat berserta alamat aksesnya), Bukti Penerapan (Bukti atas penerapan "Prosedur Pengoperasian Baku".</li> <li>• Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan pusat data</li> <li>• Log penggunaan layanan pusat data dari masing-masing unit kerja</li> <li>• Katalog layanan pusat data.</li> <li>• Prosedur Pengoperasian Baku Pusat Data.</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan perawatan Pusat</li> </ul>

	<p>Data</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notulensi review dan evaluasi layanan Pusat Data</li> <li>• Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan Pusat Data</li> </ul>
--	---

Program 10.1. Evaluasi, Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Interkoneksi Tertutup Antar OPD

Kode Program	10.1
Nama Program	Evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun	2022-2023
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan infrastruktur jaringan</li> <li>• Penyediaan fasilitas backup jaringan</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan</li> <li>• Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan</li> <li>• Penerapan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) untuk akses jaringan secara <i>remote</i></li> <li>• Pembuatan Kebijakan tentang Interkoneksi Jaringan dengan Instansi lain;</li> <li>• Perbaikan SOP Jaringan Intra, Pembuatan Laporan Review Jaringan Intra</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil revidu dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katalog layanan Jaringan Intra</li> <li>• Prosedur operasional layanan jaringan intra</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan</li> <li>• Katalog layanan Jaringan Intra</li> <li>• Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan jaringan intra</li> <li>• Log penggunaan layanan jaringan intra dari masing-masing unit kerja perawatan jaringan intra</li> <li>• Prosedur Pengoperasian Baku jaringan intra.</li> <li>• Prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra</li> <li>• Notulensi review dan evaluasi layanan jaringan intra</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan jaringan intra</li> </ul>
--	---

Program 11.1. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kode Program	11.1
Nama Program	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.8 : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD Terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan ruang lingkup dan indikator layanan</li> <li>• Pembuatan dokumen desain API dan <i>microservices</i></li> <li>• Memastikan kebijakan integrasi dipahami</li> <li>• Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan di integrasi kan</li> <li>• Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA/WEB-API untuk mengambil <i>output</i> data dari setiap sistem yang akan dihubungkan.</li> <li>• Melakukan pengembangan API dan <i>microservices</i> layanan</li> <li>• Pengembangan pedoman pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan</li> <li>• Penyusunan revisi penyempurnaan sistem penghubung layanan berdasarkan hasil reviu dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja dan telah didokumentasikan secara formal</li> <li>• Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi,</li> </ul>

	<p>dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> <li>• Dokumentasi berupa tautan dan/atau tangkapan layar Sistem Penghubung Layanan Instansi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi</li> </ul>
--	---

Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat

Kode Program	12.1
Nama Program	Penyediaan <i>bandwidth</i> yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Sukoharjo
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kebutuhan <i>bandwidth</i> per OPD</li> <li>• Melakukan penambahan kapasitas <i>bandwidth</i> jika diperlukan</li> <li>• Melakukan QoS, untuk mengatur kebutuhan <i>bandwidth</i></li> <li>• Memastikan sumber internet OPD terpusat melalui Dinas Kominfo</li> <li>• Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (<i>Network Monitoring System</i>)</li> <li>• Penyediaan fasilitas <i>backup</i> jaringan internet</li> </ul>

Program 13.1. Penyediaan layanan *Cloud* untuk Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	13.1
--------------	------

Nama Program	Penyediaan layanan <i>Cloud</i> untuk Kabupaten Sukoharjo
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10 : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk <i>data center</i> yang berbasis virtualisasi</li> <li>• Menetapkan jenis layanan <i>cloud</i> yang akan disediakan ( IAAS, PAAS, SAAS)</li> <li>• Memilih teknologi <i>cloud</i> yang akan digunakan</li> <li>• Mensosialisasi adanya cloud lokal</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Server</li> <li>• Evaluasi Kinerja dan Audit Log Server</li> <li>• Penyediaan fasilitas backup server dengan <i>auto-backup realtime</i> dan <i>co-location</i></li> <li>• Penyediaan File Server dengan NAS (<i>Network Attached Storage</i>) untuk OPD</li> </ul>

## Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	14.1
Nama Program	Pembentukan Portal Data Kabupaten Sukoharjo
	2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3 : Membangun Metadata Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bappelbangda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan sumber data</li> <li>• Menentukan Struktur data</li> <li>• Menentukan metadata</li> <li>• Menerapkan <i>Data Security</i></li> <li>• Membangun Aplikasi Sistem Portal Data</li> <li>• Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (Data Mangement Body of Knowledge) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data</li> <li>• Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data</li> <li>• Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD</li> <li>• Implementasi sistem Manajemen <i>Backup</i> Data secara terpusat</li> <li>• Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)</li> <li>• Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.</li> <li>• Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data</li> <li>• Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja.</li> <li>• Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data</li> <li>• Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data</li> </ul>
--	---

Program 15.1. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan, Ketersediaan, Keaslian, dan Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Sumber Daya Terkait Data Dan Informasi

Kode Program	15.1
Nama Program	Penggunaan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan ( <i>nonrepudiation</i> ) sumber daya terkait data dan informasi
	2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3 : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan <i>Defense In Depth</i></li> <li>• Menerapkan teknologi perimeter ( Firewall, IDS, IPS )</li> <li>• Menerapkan QoS (<i>Quality of Service</i>) untuk pengaturan <i>bandwidth</i></li> <li>• Menerapkan <i>Update Patch</i> secara regular pada PC dan Server</li> <li>• Menerapkan Enkripsi Data</li> <li>• Menerapkan Secure Programming untuk aplikasi</li> <li>• Melakukan Pentest secara berkala</li> <li>• Penyusunan SOP Pengembangan dan Pengujian Sistem Informasi yang aman</li> <li>• Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang <i>Secure Programming</i></li> <li>• Penerapan sistem SIEM (<i>Security Information and Event Management</i>)</li> <li>• Penambahan IDS (<i>Intrusion Detection System</i>) / IPS (<i>Intrusion Prevention System</i>)</li> <li>• Penerapan <i>Honeynet</i> dan DMZ (<i>Demilitarized Zone</i>)</li> <li>• Pengadaan perangkat lunak open source atau yang berlisensi</li> </ul>

Program 15.2. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat

Kode Program	15.2
Nama Program	Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
	2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3 : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Kebijakan Penerapan Keamanan Informasi</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Menurunkan kebijakan dalam SOP harian</li> <li>• Monitor dan Evaluasi SOP</li> <li>• Memasukan SOP sebagai penilaian kinerja</li> <li>• Sosialisasi dan peningkatan kesadaran bagi seluruh OPD tentang keamanan informasi</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kebijakan tentang penerapan keamanan informasi yang sudah disahkan</li> <li>• Notulensi rapat</li> <li>• Dokumentasi kegiatan</li> <li>• Dokumen SOP yang sudah disahkan</li> <li>•</li> </ul>

Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	16.1
Nama Program	Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
	2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data</li> <li>• Menentukan Business Case Pemda untuk disolusikan dengan data</li> <li>• Membangun sistem <i>big data</i> infrastruktur dan aplikasi )</li> <li>• Menentukan sumber data pemda ( dokumen, video, database, <i>social media</i>, audio)</li> <li>• Melakukan Ekstrasi Data</li> <li>• Memastikan kualitas data dengan metode <i>cleansing</i> dan <i>filtering</i></li> <li>• Mengintegrasikan data untuk masuk ke dalam sistem big data</li> </ul>

Program 16.2. Penerapan *Machine Learning* untuk analisa data menuju kecerdasan buatan

Kode Program	16.2
Nama Program	Penerapan <i>Machine Learning</i> untuk analisa data menuju kecerdasan buatan
	2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data dan <i>machine learning</i></li> <li>• Membangun sistem <i>big data</i> secara infrastruktur</li> <li>• Membangun sistem <i>data analytic</i> berbasis <i>machine learning</i>, dengan pilihan teknologi dan vendor yang sesuai kebutuhan</li> <li>• Menampilkan <i>data analytic</i> dalam sebuah <i>command center</i></li> <li>• Memberikan pemahaman kepada pimpinan untuk menggunakan data untuk mengambil keputusan</li> </ul>

Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE

Kode Program	17.1
Nama Program	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE
	5.04.02.2.01.03 : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Inisiatif Strategis	Promosi Literasi SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memilih lembaga pelatihan yang kompeten (LSP BNSP)</li> <li>• Menyusun topik materi sosialisasi SPBE</li> <li>• Menyusun metode sosialisasi yang berkesinambungan</li> <li>• Melakukan sosialisasi</li> <li>• Melakukan evaluasi</li> </ul>

Program 18.1. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE

Kode Program	18.1
Nama Program	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE
	5.04.02.2.01.03 : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2022-2024
Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menentukan dan menambah jumlah formasi jabatan fungsional</li> <li>▪ Melakukan penerimaan pegawai yang sesuai</li> </ul>

## Program 18.2. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE

Kode Program	18.2
Nama Program	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE
	5.04.02.2.01.03 : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengambil referensi dari standar kompetensi SDM yang ada</li> <li>▪ Kerjasama dengan akademisi melalui PKL dan <i>Internship</i></li> <li>▪ Memilih lembaga pelatihan dengan label LSP (lembaga sertifikasi profesi BNSP)</li> <li>▪ Menentukan pelatihan yang sesuai untuk ASN penyelenggara SPBE <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan SDM Tata Kelola SPBE (<i>Business Analyst, IT Service Manager, Enterprise Architect, GCIO</i>)</li> <li>- Pelatihan SDM Infrastruktur TIK (<i>Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist, Operation Center Specialist</i>)</li> <li>- Pelatihan SDM Pengembangan Aplikasi (<i>Web Developer, system Analyst, Database Administrator</i>)</li> <li>- Pelatihan SDM Big Data (<i>Big Data Specialist, Data Specialist, Data Science, Machine Learning</i>)</li> <li>- Pelatihan SDM Literasi Digital (<i>Digital Skill</i>) untuk seluruh ASN</li> </ul> </li> <li>▪ Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan perencanaan</li> <li>▪ Melakukan uji sertifikasi nasional</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumentasi kegiatan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN (salah satunya skill) oleh unit pengelola SDM ASN (misal: BKPSDM).</li> <li>▪ Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kinerja/kompetensi SDM TIK</li> </ul>

## Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE

Kode Program	19.1
Nama Program	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.8 : Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Inisiatif Strategis	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penetapan definisi dan ruang lingkup kolaborasi</li> <li>▪ Penyusunan kebijakan kolaborasi</li> <li>▪ Menentukan komponen Forum (Universitas, Komunitas, Wakil masyarakat, ASN /OPD, Pelaku Usaha)</li> <li>▪ Menentukan Agenda dan Topik dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu</li> <li>▪ Membahas isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE dalam <i>output</i> pada layanan public terpadu dan layanan Adpem terpadu</li> <li>▪ Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut</li> <li>▪ Pembuatan SOP Kolaborasi SPBE antar unit kerja, Pembuatan Laporan Kegiatan kolaborasi antar unit kerja, Pembuatan laporan penggunaan kolaborasi tiap unit kerja</li> <li>▪ Penyelenggaraan kegiatan koordinasi Tim Koordinasi SPBE dengan seluruh perwakilan unit kerja.</li> <li>▪ Review dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE</li> <li>▪ Penyusunan revisi penyempurnaan penerapan kolaborasi antar unit kerja Tim Koordinasi SPBE berdasarkan hasil revidu dan telaahan</li> </ul>
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Notulensi/catatan/laporan hasil rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE</li> <li>▪ Bukti undangan rapat rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE</li> <li>▪ Dokumentasi aktivitas kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Instansi dan/atau dilengkapi bukti-bukti undangan rapat notulensi/catatan/laporan kolaborasi penerapan SPBE</li> <li>▪</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE</li><li>▪ Notulensi/catatan/laporan kegiatan rutin Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau bukti undangan kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE</li><li>▪ Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi untuk Kolaborasi SPBE dalam mendukung pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja</li><li>▪ Notulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Kolaborasi SPBE terpadu, serta reviu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE</li><li>▪ Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE</li><li>▪ Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi perbaikan pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE</li></ul>
--	---

## BAB VIII

### PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Sukoharjo sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Sukoharjo, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Sukoharjo meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Sukoharjo meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo ini bukan dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel. Dokumen *Peta Rencana* SPBE Kabupaten Sukoharjo harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pada akhirnya, dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Sukoharjo dapat menjadi acuan dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan *good governance* di Kabupaten Sukoharjo yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.

ETIK SURYANI